

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik penulis, sebagai berikut:

1. Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar, melibatkan empat belas *stakeholders* yang menjalankan lima peran berdasarkan teori Nugroho (2014). Peran *policy creator* dan koordinator dijalankan oleh MCB sebagai *leading sector* bersama Disparpora Kabupaten Karanganyar, mencakup perumusan regulasi, penetapan zonasi kawasan, penentuan kompensasi, serta penyelenggaraan forum koordinasi dan monitoring evaluasi secara berkala. Peran fasilitator dijalankan oleh MCB sebagai fasilitator utama didukung Disparpora dan DLH Kabupaten Karanganyar, meskipun peran DLH ditemukan belum berjalan efektif sesuai PKS. Peran implementator dijalankan dominan oleh MCB melalui Unit Klaster Museum Dayu, mencakup pengelolaan operasional, dokumentasi, hingga pengawasan konstruksi, namun promosi wisata digital ditemukan belum konsisten dan masif. Peran akselerator dijalankan oleh Pemerintah Desa Dayu, Pokdarwis Dayu, Karang Taruna Desa Dayu, Kelompok Kesenian Tari Purba, pedagang museum, pelaku umkm sekitar, wisatawan lokal, PT. Sinergi Colomadu, dan PHRI Karanganyar, namun secara keseluruhan belum berjalan optimal karena partisipasi masyarakat masih terbatas dan keterlibatan sektor swasta masih bersifat insidental dan belum menyentuh aspek pendanaan atau penyediaan fasilitas dasar wisata.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar, teridentifikasi ke dalam tiga faktor pendorong dan empat faktor penghambat yang memengaruhi peran *stakeholders*. Faktor pendorong meliputi: (1) komitmen kelembagaan antar *stakeholders* yang terwujud melalui PKS dan mekanisme monitoring evaluasi berkala sebagai faktor internal; (2) dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah melalui Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 yang menetapkan kawasan Museum Dayu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK); serta (3) pengakuan dan legitimasi kelembagaan dari institusi resmi berupa status cagar budaya nasional dan pengakuan UNESCO terhadap Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia, keduanya sebagai faktor eksternal. Adapun faktor penghambat meliputi: (1) keterbatasan inovasi dan inisiatif SDM pengelola objek wisata; (2) keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan event dan promosi wisata, keduanya sebagai faktor internal; serta (3) rendahnya partisipasi masyarakat Desa Dayu; dan (4) rendahnya keterlibatan aktif sektor swasta dalam ekosistem pariwisata Museum Dayu, keduanya faktor tersebut berperan sebagai faktor eksternal yang secara bersama-sama menghambat optimalisasi pengembangan objek wisata Museum Dayu.

4.2 Saran

Berdasarkan kendala dan tantangan yang ditemukan dalam penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian. Peran stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Manusia Purba Klaster Dayu di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

1. Museum dan Cagar Budaya (MCB) perlu mengintensifkan pemeliharaan fasilitas dasar wisata secara berkala dengan menyusun jadwal perawatan yang terdokumentasi, mempercepat pengajuan anggaran revitalisasi kepada Kementerian Kebudayaan dengan dukungan data kondisi objek wisata yang komprehensif, serta mengoptimalkan status BLU untuk menjalin kemitraan pembiayaan dengan pihak swasta. Selain itu, inovasi layanan yang telah tersedia seperti *e-catalog* berbasis QR code perlu diintegrasikan ke dalam standar operasional pelayanan pengunjung secara menyeluruh.
2. Disparpora Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui program kunjungan edukatif terjadwal dan wajib bagi sekolah-sekolah dari jenjang dasar hingga menengah di Kabupaten Karanganyar dengan target siswa-siswa sebagai upaya memperluas segmen wisatawan pelajar. Di samping itu, Disparpora perlu menginisiasi penyelenggaraan event tematik berbasis paleontologi dan kebudayaan lokal secara berkala serta menetapkan jadwal publikasi konten promosi digital yang konsisten dan terencana di seluruh platform media sosial yang dikelola.

3. Pemerintah Desa Dayu dan Masyarakat Lokal perlu mendampingi kelompok-kelompok yang telah terbentuk seperti Pokdarwis Dayu, Karang Taruna Desa Dayu, dan Kelompok Kesenian Tari Purba secara berkelanjutan agar mampu menyusun paket wisata budaya terpadu yang mengintegrasikan kunjungan museum, pertunjukan Tari Purba, dan layanan *homestay*. Promosi ketersediaan *homestay* di Kawasan Museum dayu dapat dilakukan dengan membuat media sosial yang dapat di kelola oleh Pokdarwis Dayu agar lebih mudah diakses oleh wisatawan.
4. Kemitraan dengan sektor swasta/privat, perlu diperluas oleh MCB dan Unit Klaster Museum Dayu dengan cara menyusun skema kemitraan yang lebih menarik bagi calon mitra swasta/privat, yang mencakup kerja sama dalam penyelenggaraan event bersponsor dan pengembangan produk wisata bersama. Kemitraan dan kerja sama yang telah terjalin dengan PT. Sinergi Colomadu dan PHRI Karanganyar perlu diperluas tidak hanya pada aspek promosi wisata semata, tetapi juga pada aspek pendanaan dan pengembangan produk wisata bersama guna mengurangi ketergantungan pada anggaran APBN sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata Museum Dayu secara lebih mandiri dan berkelanjutan.